LAPORAN KINERJA (LAKIN)

KPP PRATAMA SLEMAN

2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Sleman merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Sleman mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini kami sampaikan LAKIN Tahun 2024 KPP Pratama Sleman. Penyusunan LAKIN disusun dengan memperhatikan Kontrak Kinerja KPP Pratama Sleman yang disusun pada awal tahun 2024, Renstra DJP 2020-2024 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan. Dari Kontrak Kinerja yang telah disusun, setiap pegawai berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan, walaupun pada akhirnya ada beberapa yang realisasinya kurang dari target yang ditetapkan. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa kinerja dari KPP Pratama Sleman kurang, karena seluruh pegawai sudah bekerja keras semaksimal dan seoptimal mungkin untuk berusaha mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas capaian realisasi kinerja KPP Pratama Sleman Tahun 2024 dan semoga akan dapat terus kami tingkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Sleman, 24 Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Moch. Luqman Hakim

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN, sektor perpajakan memberikan peran penting dari total penerimaan negara. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak dituntut dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya tanggung jawab tersebut. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang harus terus menerus digali dan ditingkatkan peranannya demi kesinambungan pembangunan. Selain itu, pajak juga merupakan perwujudan nyata peran serta seluruh rakyat dalam membiayai negara dan pemerintahannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak, baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional di bawahnya berupaya untuk terus menerus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus pemberian pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Dan salah satu tujuan KPP Pratama Sleman adalah mendukung terealisasinya penerimaan pajak tahun anggaran 2024. Selain tercapainya penerimaan Pajak, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh KPP Pratama Sleman telah tertuang dalam Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol/uji kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya *good governance*. Selain itu, LAKIN ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Sleman secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya, LAKIN ini juga menggambarkan sasaran tugas KPP Pratama Sleman, yaitu mengamankan penerimaan Pajak tahun anggaran 2024**.** Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kantor wilayah serta dukungan pihak lainnya.

Beberapa hal yang dirasakan masih perlu diperbarui agar penerimaan pajak dapat lebih optimal antara lain adalah pembenahan IT, SDM, Anggaran, Organisasi dan Proses Bisnis serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Dengan adanya kendala–kendala tersebut, KPP Pratama Sleman telah mengambil langkah–langkah dalam mengatasinya, misalnya melakukan perbaikan jaringan yang mendukung percepatan akses data yang berhubungan dengan sistem informasi di bidang perpajakan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui *in house training*/diklat, melakukan revisi anggaran serta pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor. Selain itu, dalam rangka terwujudnya sistem administrasi perkantoran modern, KPP Pratama Sleman telah mengambil langkah–langkah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **II**
DAFTAR ISI ..... **III**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 1
C. Struktur Organisasi 1
D. Peran Strategis KPP Pratama Sleman 4
E. Sistematika Pelaporan 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA **9**
A. Rencana Strategik 9
1. Pernyataan Visi dan Penjelasannya 9
2. Pernyataan Misi dan Penjelasannya 10
3. Tujuan 10
4. Sasaran 10
5. Rencana Kerja KPP Pratama Sleman 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **15**
A. Capaian Kinerja Organisasi 15
1. Capaian IKU Tahun 2024 15
2. Perbandingan Capaian IKU Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 202 17
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja 18
4. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja 39
5. Kinerja Lainnya 41
B. Realisasi Anggaran 42
BAB IV PENUTUP **44**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan visi dan mencapai misi DJP, dan sekaligus sebagai pemacu peningkatan kinerja. LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan
5. Pelaksanaan administrasi DJP
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

C. Struktur Organisasi

KPP Pratama Sleman merupakan unit vertikan Eselon III di bawah Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Pejabat Eselon III yang membawahi 1 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, 9 Seksi dan 2 Kelompok Fungsional, dengan total keseluruhan pegawai sampai dengan akhir Desember 2024 sejumlah 113 Pegawai, dengan penjelasan rincian sebaran pegawai sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peta Jabatan

Jabatan	Jumlah
Pejabat Pengawas (Eselon IV)	10
Pelaksana	34
Juru Sita	2
Account Representative	39

Administrator Sistem	2
Bendaharawan	1
Sekretaris	1
Pemeriksa Pajak Madya	1
Pemeriksa Pajak Muda	6
Pemeriksa Pajak Pelaksana	3
Pemeriksa Pajak Pertama	4
Penilai Pajak Ahli Pertama	1
Penyuluh Pajak Ahli Muda	2
Penyuluh Pajak Ahli Pertama	4
Asisten Penyuluh Pajak Terampil	2

2. Berdasarkan Peta Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda/IVc	1
Pembina Tk.I/IVb	1
Pembina/Iva	11
Penata Muda Tk.I/IIIb	26
Penata Muda/IIIa	21
Penata Tk.I/IIId	21
Penata/IIIc	23
Pengatur Muda Tk.I/IIb	2
Pengatur Tk.I/IId	3
Pengatur/IIc	4

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
SMA	1
Diploma I	6
Diploma III	15
Perguruan Tinggi (S1) / Diploma IV	68
Pasca Sarjana (S2)	23

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	62
Perempuan	51

5. Diagram Peta Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman

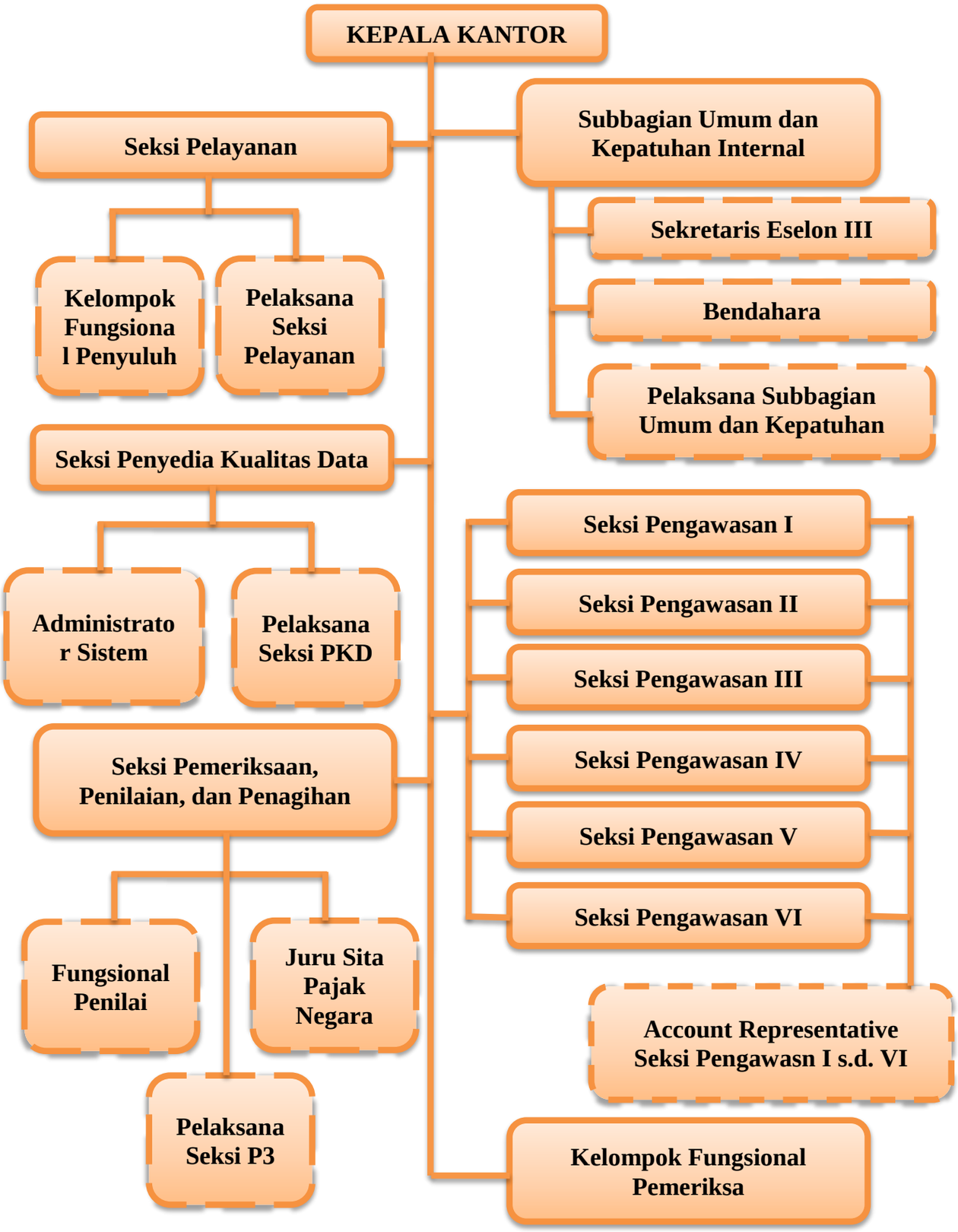

D. Peran Strategis KPP Pratama Sleman

KPP Pratama Sleman melaksanakan peran strategis yaitu melakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya wajib pajak yang berdomisili dan atau objek pajak yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Secara geografis, KPP Pratama Sleman berada di wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 17 Kapanewon (Kecamatan), yaitu:

1. Kecamatan Moyudan
2. Kecamatan Minggir
3. Kecamatan Seyegan
4. Kecamatan Godean
5. Kecamatan Gamping
6. Kecamatan Mlati
7. Kecamatan Depok
8. Kecamatan Berbah
9. Kecamatan Prambanan
10. Kecamatan Kalasan
11. Kecamatan Ngemplak
12. Kecamatan Ngaglik
13. Kecamatan Sleman
14. Kecamatan Tempel
15. Kecamatan Turi
16. Kecamatan Pakem
17. Kecamatan Cangkringan

Peta Kab Sleman Yogyakarta

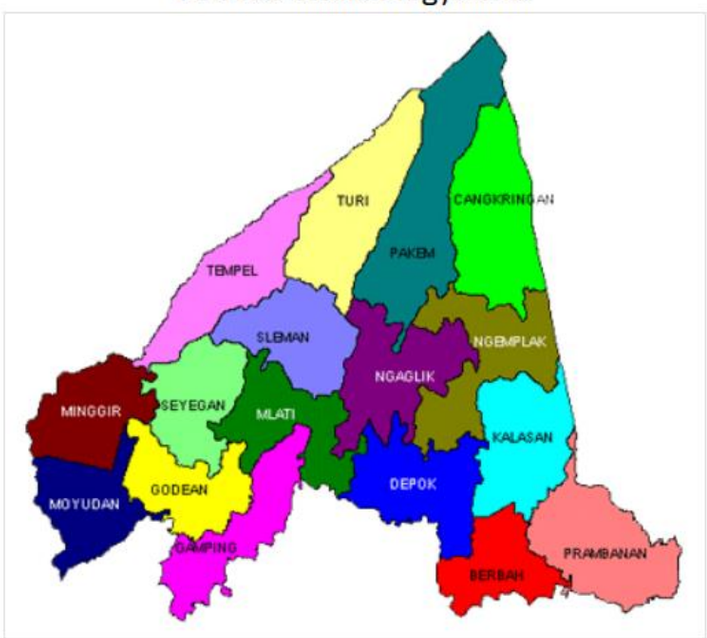

Pada tahun 2024 KPP Pratama Sleman mendapat amanat target penerimaan sebesar Rp2.961.433.957.000 dan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 tercapai sebesar Rp2.962.540.369.455,- atau sebesar 100,04% dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. Rencana dan Realisasi

Kinerja Penerimaan

TAHUN 2024 BULAN Januari SAMPAI Desember UNIT KPP Se-KANWIL URUT Pertumbuhan Bruto Perhitungan Total Lihat Data

DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA YOGYAKARTA	2,306,157,399,000	2,176,992,888,048	0	165,437,078,613	-14,787,609,408	15,638,859,678	2,343,281,216,931	33,925,070,845	2,309,356,146,086	2,011,551,248,709	1,937,666,400,764	100.14	16.49	19.18
2	PRATAMA BANTUL	1,079,746,117,000	1,102,515,186,464	0	44,285,056,796	-10,955,585,557	11,184,131,214	1,147,028,788,917	65,861,476,455	1,081,167,312,462	1,011,443,576,477	959,648,454,043	100.13	13.41	12.66
3	PRATAMA WATES	237,695,112,000	248,317,234,176	0	10,214,693,910	-2,599,672,720	2,497,490,390	258,429,745,756	19,757,450,945	238,672,294,811	231,536,264,679	209,913,387,700	100.41	11.62	13.7
4	PRATAMA SLEMAN	2,961,433,957,000	2,623,717,453,271	0	420,934,236,525	-29,208,959,007	29,446,918,644	3,044,889,649,433	82,349,279,978	2,962,540,369,455	2,758,465,105,254	2,719,872,190,632	100.04	10.38	8.92
5	PRATAMA WONOSARI	212,864,271,000	214,494,979,820	0	9,219,412,456	-3,189,853,239	2,337,641,936	222,862,180,973	9,866,704,581	212,995,476,392	207,530,002,442	194,934,284,562	100.06	7.39	9.27
	Jumlah	6,797,896,856,000	6,366,037,741,779	0	650,090,478,300	-60,741,679,931	61,105,041,862	7,016,491,582,010	211,759,982,804	6,804,731,599,206	6,220,526,197,561	6,022,034,717,701	100.10	12.80	13.00

Sumber : Data Appportal per 20 Januari 2025

b. Pencapaian dan Pertumbuhan Per Jenis Pajak

URAIAN	TARGET	PENERIMAAN TAHUN 2024			NETTO TAHUN 2023	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
		BRUTO	SPMKP	NETTO			
A. Pajak Penghasilan	1.689.736.712.000	1.717.248.904.124	10.412.800.283	1.706.836.103.841	1.499.763.965.874	101.01%	13.81%
1. PPh NON MIGAS	1.689.736.712.000	1.717.242.927.472	10.412.800.283	1.706.830.127.189	1.499.764.875.674	101.01%	13.81%
2. PPh MIGAS	-	5.976.652	-	5.976.652	- 909.800	0%	756.92%
B. PPN dan PPnBM	1.271.246.258.000	1.327.165.375.049	71.936.479.695	1.255.228.895.354	1.216.670.895.190	98.74%	3.17%
C. PBB & BPHTB	-	-	-	-	-	-	-
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	-	-	2.919.312.350	00.00	-100%
E. Pajak Lainnya	450.987.000	475.370.260	-	475.370.260	518.017.218	105.41%	-8,23%
Jumlah (A+B+C+D+E)	2.961.433.957.000	3.044.889.649.433	82.349.279.978	2.962.540.369.455	2.719.872.190.632	100,04%	8,92%

c. Kontribusi dan Pertumbuhan Per Sektor

Sektor	Nama	2024	Peranan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.809.627.471	0,23%
B	Pertambangan dan Penggalian	3.105.703.867	0,10%
C	Industri Pengolahan	321.480.537.391	10,85%
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	534.446.622	0,02%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	5.046.150.501	0,17%
F	Konstruksi	137.204.340.739	4,63%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	621.568.060.172	20,98%
H	Transportasi dan Pergudangan	108.856.230.297	3,67%
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	145.598.055.480	4,91%
J	Informasi dan Komunikasi	52.637.512.348	1,78%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	133.395.053.036	4,50%
L	Real Estate	70.139.276.396	2,37%
M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	90.037.482.357	3,04%
N	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	67.320.810.297	2,27%
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	727.616.836.378	24,56%
P	Jasa Pendidikan	252.700.244.981	8,53%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76.830.102.372	2,59%
R	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	33.327.044.832	1,12%
S	Kegiatan Jasa Lainnya	13.682.104.965	0,46%
T	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	322.895.165	0,01%
Z	Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	91.334.861.525	3,08%
unknown	Wajib Pajak KLU Error	2.992.992.263	0,10%
	Jumlah	**2.962.540.369.455**	

d. Pencapaian Penerimaan Per Bulan

Bulan	Bruto	Netto
Januari	233.117.425.967	231.410.344.850
Februari	182.226.479.632	178.080.623.486
Maret	260.557.163.653	251.832.167.769
April	312.406.764.305	302.149.299.938
Mei	200.299.440.485	195.540.193.614
Juni	228.375.871.436	226.060.786.741
Juli	228.956.280.556	223.894.460.969
Agustus	240.225.336.722	236.932.439.758
September	245.824.330.013	218.040.415.451
Oktober	272.484.457.387	267.468.025.248
November	251.559.602.486	243.651.346.556
Desember	388.856.496.791	387.480.265.075
Jumlah	**3.044.889.649.433**	**2.962.540.369.455**

e. Tren Pencapaian dan Pertumbuhan

URAIAN.	TARGET	PENERIMAAN TAHUN 2024			NETTO TAHUN 2023	CAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)
		BRUTO	SPMKP	NETTO			
A. Pajak Penghasilan	1.689.736.712.000	1.717.248.904.124	10.412.800.283	1.706.836.103.841	1.499.763.965.874	101.01%	13.81%
1. PPh NON MIGAS	1.689.736.712.000	1.717.242.927.472	10.412.800.283	1.706.830.127.189	1.499.764.875.674	101.01%	13.81%
1.1 PPh Pasal 21	616.457.620.000	645.686.220.932	120.879.000	645.565.341.932	540.744.545.346	104.72%	19.38%
1.2 PPh Pasal 22	29.409.839.000	29.504.789.458	22.500.000	29.482.289.458	29.259.876.794	100.25%	0.76%
1.3 PPh Pasal 22 Impor	34.607.591.000	27.690.376.450	-	27.690.376.450	24.808.095.513	80.01%	11.62%
1.4 PPh Pasal 23	72.594.958.000	72.801.222.024	116.513.780	72.684.708.244	63.997.632.821	100.12%	13.57%
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	77.386.421.000	72.184.136.311	541.231.114	71.642.905.197	53.806.559.707	92.58%	33.15%
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	400.075.046.000	409.868.527.247	9.581.509.298	400.287.017.949	361.582.839.563	100.05%	10.70%
1.7 PPh Pasal 26	24.130.998.000	24.130.998.301	-	24.130.998.301	18.289.308.465	100.00%	31.94%
1.8 PPh Final	435.059.464.000	435.360.881.696	30.167.091	435.330.714.605	407.210.802.623	100.06%	6.91%
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
1.10 PPh Non Migas Lainnya	14.775.000	15.775.053	-	15.775.053	65.214.842	106.77%	-75.81%
2. PPh MIGAS	-	5.976.652	-	5.976.652	-9.098	0.00%	756.92%
2.1 PPh Minyak Bumi	-	3.301.710	-	3.301.710	-9.218	0.00%	458.18%
2.2 PPh Gas Alam	-	2.667.742	-	2.667.742	12	0.00%	22,131.18 %
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	-	72	-	72	-	0.00%	0.00%

URAIAN	TARGET	PENERIMAAN TAHUN 2024	NETTO TAHUN 2023	CAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)	CAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)
		BRUTO	SPMKP	NETTO			
B. PPN dan PPnBM	1.271.246.258.000	1.327.165.375.049	71.936.479.695	1.255.228.895.354	1.216.670.895.190	98.74%	3.17%
1. PPN Dalam Negeri	1.175.538.319.000	1.247.785.886.425	71.936.479.695	1.175.849.406.730	1.160.875.399.174	100.03%	1.29%
2. PPN Impor	95.465.068.000	79.216.269.831	-	79.216.269.831	53.239.348.518	82.98%	48.79%
3. PPnBM Dalam Negeri	111.626.000	25.973.310	-	25.973.310	-149.911.296	23.27%	117.33%
4. PPnBM Impor	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
5. PPN Lainnya	131.245.000	137.245.483	-	137.245.483	393.556.241	104.57%	-65.13%
6. PPnBM Lainnya	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7. PPN DN DTP	-	-	-	-	2.312.502.553	0.00%	-100.00%
8. PPNBM DTP	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
C. PBB dan BPHTB	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
1. Pendapatan PBB	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
a. PBB Perdesaan	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
b. PBB Perkotaan	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
c. PBB Perkebunan	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
d. PBB Kehutanan	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
e. PBB Pertambangan Minerba	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
f. PBB Migas	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
g. PBB Pertambangan	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
h. PBB lainnya	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2. Pendapatan BPHTB	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	-	-	2.919.312.350	0.00%	-100.00%
1. PPh Pasal 21	-	-	-	-	2.019.667.144	0.00%	-100.00%
2. PPh Pasal 22	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3. PPh pasal 22 Impor	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
4. PPh Pasal 23	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
5. PPh Pasal 25/29 OP	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
6. PPh Pasal 25/29 Badan	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7. PPh Pasal 26	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
8. PPh Final	-	-	-	-	899.645.206	0.00%	-100.00%
9. PPh Non Migas lainnya DTP	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
JUMLAH D	-	-	-	-	2.919.312.350	0.00%	-100.00%
E. Pajak Lainnya	450.987.000	475.370.260	-	475.370.260	518.017.218	105.41%	-8.23%
1. Bea Meterai	79.708.000	94.089.000	-	94.089.000	144.654.000	118.04%	-34.96%
2. Penjualan Benda Meterai	-	-	-	-	1.376.897	0.00%	-100.00%

URAIAN	TARGET	PENERIMAAN TAHUN 2024	NETTO TAHUN 2023	CAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)	CAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)
		BRUTO	SPMKP	NETTO			
3. PTLL	8.165.000	8.365.689	-	8.365.689	2.790.464	102.46%	199.80%
4. Bunga Penagihan PPh	357.201.000	366.901.599	-	366.901.599	277.621.782	102.72%	32.16%
5. Bunga Penagihan PPN	5.913.000	6.013.972	-	6.013.972	91.574.075	101.71%	-93.43%
6. Bunga Penagihan PPnBM	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7. Bunga Penagihan PTLL	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
8. PIB	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
9. PPN Batu Bara	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
JUMLAH (A + B + C + D + E)	**2,961,433,957,000**	**3.044.889.649.433**	**82.349.279.978**	**2.962.540.369.455**	**2.719.872.190.632**	**100.04%**	**8.92%**

E. Sistematika Pelaporan

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian Lakin disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020, tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 dan Target Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

a. Rasio Perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan
b. Pembangunan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

maka KPP Pratama Sleman dalam menyusun visi, misi, dan renstranya mengacu pada renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

A. Rencana Strategik

1. Pernyataan Visi dan Penjelasannya

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020, tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tersebut di atas. Visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah: Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (Compliance Risk Management), perlakuan adil dalam

mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

2. Pernyataan Misi dan Penjelasannya

Untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan diantaranya:

a. menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
b. mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
c. memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
d. mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
e. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak diantaranya:

a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi

3. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan KPP Pratama Sleman untuk Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi 4 perspektif yaitu:

a. Stakeholder Perspective
b. Customer Perspective
c. Internal Process Perspective
d. *Learning and Growth Perspective*

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik. Berdasarkan uraian di atas KPP Pratama Sleman mempunyai sasaran strategis sesuai dengan empat perspektif di atas yaitu:

a. Stakeholder Perspective memiliki sasaran strategis berupa penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;

b. Customer Perspective memiliki sasaran strategis berupa kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dan kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

c. Internal Process Perspective memiliki sasaran strategis berupa:
   - Edukasi dan pelayanan yang efektif
   - Persentase pengawasan pembayaran masa
   - Pengujian kepatuhan material yang efektif
   - Penegakan hukum yang efektif
   - Data dan informasi yang berkualitas

d. Learning & Growth Perspective memiliki sasaran strategis berupa:
   - Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
   - Pengelolaan keuangan yang akuntabel

5. Rencana Kerja KPP Pratama Sleman

Rencana kerja Tahun 2024 KPP Pratama Sleman difokuskan untuk pencapaian target yang telah disetujui sesuai dengan Kontrak Kerja Organisasi. Penyusunan Kontrak Kinerja mengacu pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.

Adapun target kinerja yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Sleman Tahun 2024 adalah sesuai dengan target di Perjanjian Kinerja nomor PK-8/WPJ.23/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang mengalami perubahan nomor menjadi SKP-42/WPJ.23/2024 tanggal 20 Februari 2024. Perubahan terjadi diakibatkan karena pada tanggal 20 Februari 2024 KPP Pratama Sleman mendapatkan Kepala Kantor Definitif sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-236/KM.1/2024 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan. Rincian atas Kontrak Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut.

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
1	**Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal**							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	45%	46%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100	100	100	100	100	100	100

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
	dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
2	**Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	46%	46%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	**Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	**Edukasi dan pelayanan yang efekti**							
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	**Pengawasan pembayaran masa yang Efektif**							
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	**Pengujian kepatuhan material yang efektif**							

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	**Penegakan hukum yang efektif**							
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	**Data dan Informasi yang berkualita**							
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	**Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**							
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan	100	100	100	100	100	100	100

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
	Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM							
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
9c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	**Pengelolaan keuangan yang akuntabel**							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian IKU Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal	Target Addendum	Realisasi	Indeks Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	101,04%	101,04
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	103,61	103,61
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100,02%	100,02
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	116,82%	116,82
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100,39%	100,39
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%	120
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	-	107,84%	107,84
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	120%	120
6	Pengujian kepatuhan	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	120%	120

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal	Target Addendum	Realisasi	Indeks Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	material yang efektif	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	120%	120
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%		117,38%	117,38
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	120%	120
		Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	111,09%	120
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	200%	120
8	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	120%	120
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	-	100%	120
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	-	117,43	117,43
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	95,74	112,63
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	98,61	109,57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	120	120

Catatan : data di atas berdasarkan pada NKO yang disampaikan ke Kanwil DJP DIY pada tanggal 4 Januari 2024 dan belum dilakukan validasi oleh Kanwil.

2. Perbandingan Capaian IKU Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Indeks Capaian 2022	Indeks Capaian 2023	Indeks Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	120,00	101,62	100,04
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	114,58	103,61
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	120,00	119,99	100,02
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,25	94,88	116,82
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tingg	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	102,33	48,40	100,39
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	120	120
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	107,29	103,19	107,84
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	115,27	120	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	116,82	120	120
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	118,59	118,59
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	117,38
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120,00	120	120
		Tingkat efektivitas penagihan	120,00	120	120
		Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	-	117,65	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Indeks Capaian 2022	Indeks Capaian 2023	Indeks Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	120
8	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	120	120
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	120	120
9	SDM yang kompeten	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	113,10	119,91	117,43
		Indeks Penilaian Integritas Unit	112,61	111,84	112,63
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	111,11	111,08	109,57
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	97,60	102,57	120

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

a) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1) Persentase realisasi penerimaan pajak

Tahun	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%
Realisasi	121,75%	101,62%	100,04%
Capaian	120	120	100,04

Penjelasan Singkat:

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sleman sebesar Rp2.962.633.022.882,00, dari Target Penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp2.961.433.957.000,00, sehingga realisasi Penerimaan pajak sebesar 100,04%.

Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

Capaian Realisasi penerimaan sampai Triwulan IV untuk KPP Pratama Sleman mencapai 100,04% atau sebesar Rp2.962.540.369.455,00 dari total target yang diamanahkan pada Tahun 2024 ini yaitu Rp2.961.433.957.000,00.

Implikasi:

Realisasi Penerimaan KPP Pratama Sleman sampai dengan tgl 31 Desember 2024 sudah tercapai sesuai target trajectory triwulan IV 2024.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Menyusun dan meneliti Wajib Pajak yang menjadi daftar DSP4 dan DPP untuk diterbitkan SP2DK;
2. Menerbitkan SP2DK atas WP yang belum melakukan pembayaran, setoran turun maupun dengan rata-rata pembayaran yang sama.
3. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas WP yang terlambat melakukan penyetoran pajak ataupun yang terlambat menyampaikan SPT Masa dan/atau Tahunan.
4. Menghubungi Wajib Pajak baik lewat telepon, WA dan visit agar Wajib Pajak segera memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan perpajakan.
5. Melakukan penelitian atas SPT yang sudah disampaikan oleh Wajib Pajak dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan penghitungan pajak yang ada untuk dihimbau melakukan pembayaran atas pajak yang kurang disetor.
6. Melakukan Bedah Wajib Pajak sekaligus visit yang berguna agar AR dapat memahami proses bisnis wajib pajak dan mengetahui critical point dari usaha wajib pajak sehingga potensi SP2DK semakin berkualitas.
7. Menghimpun dan menganalisis data baik data internal maupun eksternal agar tercipta kertas kerja yang komprehensif untuk diterbitkan SP2DK.
8. Mengoptimalkan peraturan perpajakan terbaru khususnya kewajiban PKP bagi pengusaha di sektor Jasa Kesehatan, Keuangan dan Pendidikan
9. Membuat Rencana Kerja Seksi Tahun 2024, menyusun ulang Daftar WP Strategis. Evaluasi dan tindaklanjut SP2DK Outstanding, Pemutakhiran DPP Rekomendasi, Distribusi Target Penerimaan Per AR.

2) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Tahun	2022	2023	2024
Target	-	100	100
Realisasi	-	114,58	103,61
Capaian	-	114,58	103,61

Penjelasan Singkat:

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai sebesar 103,61.

Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

Realisasi pertumbuhan pajak bruto telah mencapai trajectory yang ditetapkan. Target pertumbuhan penerimaan pajak bruto Triwulan IV Tahun 2024 adalah 100%. Adapun realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 103,61% dimana indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan bruto menyumbang nilai 107,22% dan indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas sejumlah 100%.

Implikasi:

IKU Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tercapai.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Melakukan analisis secara kompeherensif terhadap WP Strategis dan WP besar lainnya.
2. Melakukan pengawasan pembayaran masa dan memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi.
3. Mengoptimalkan visit dan konseling terhadap WP.

b) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

1) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Tahun	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%
Ralisasi	126,55%	119,99%	100,02%
Capaian	120,00	119,99	100,02

Penjelasan Singkat:

Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah Rp2.773.824.259.691,00 dengan realisasi sebanyak Rp2.773.352.539.000,00 atau sebesar 100,02% dari target yang ditentukan.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Realisasi penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa sampai Triwulan IV Tahun 2024 untuk KPP Pratama Sleman sebesar 100,02% dari trajectory 100%.

Implikasi:

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tercapai.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Pengawasan pembayaran dan pelaporan, meliputi kegiatan antara lain:
    a. Surat Teguran penyampaian SPT Masa/Tahunan;
    b. Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan;
    c. Penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PPh dan PPN;
    d. Surat Imbauan Wajib Pajak untuk tahun berjalan
2. Dinamisasi angsuran pajak dalam tahun berjalan (angsuran PPh Pasal 25 terhadap WP dengan kewajiban angsuran PPh Pasal 25 dengan penghitungan tertentu (Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank);
3. Penelitian dan tindaklanjut data matchin, meliputi kegiatan antara lain:
    a. Penelitian Faktur Pajak/BuktiPotong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan;
    b. Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian;
    c. Pemeriksaan data konkret (single tax);
    d. Pemanfaatan dan tindak lanjut alket;
    e. Pengawasan atas kegiatan *corporate action*;dan
    f. Kegiatan rekonsiliasi penerimaan bendahara Pemerintah Daerah.

2) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Tahun	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%
Ralisasi	101,25%	94,88%	116,82%
Capaian	101,25	94,88	116,82

Penjelasan Singkat:

Jumlah WP Wajib SPT pada Tahun 2024 adalah sebanyak 124.679 WP, trajectory target untuk tahun 2024 adalah sebesar 100% dari WP Wajib SPT yaitu sebanyak 99.670 WP. Realisasi total SPT yang disampaikan sebanyak 101.938 SPT atau 116,82% dari trajectory target sebesar 100% dengan capaian IKU sebesar 116,82.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Realisasi untuk Triwulan IV Tahun 2024 mencapai 116,82% dan telah mencapai target trajectory 100%.

Implikasi:

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi telah tercapai sejak Triwulan II Tahun 2024.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Menerbitkan Penerbitan Surat Teguran secara periodik atas Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023.
2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas WP yang terlambat melakukan penyetoran pajak ataupun yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023.
3. Menghubungi Wajib Pajak baik lewat telepon ataupun WA Blast agar wajib pajak segera memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan perpajakan.
4. Melakukan penerimaan SPT dengan cara Jemput Bola di Desa/ Kelurahan dan Kelas Pajak Daring.
5. Melakukan pelayanan penerimaan SPT yang optimal dilaksanakan di luar kantor di pusat keramaian yang strategis (Membuka Pojok Pajak di Mall).
6. Membuka kelas pajak tatap muka di kantor.

c) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Tahun	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%
Realisasi	102,28%	48,40%	100,39%
Capaian	102,28	48,40	100,39

Penjelasan Singkat:

Target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) untuk Tahun 2024 adalah Rp188.081.418.000,00 dengan realisasi sebanyak Rp188.808.763.191,00 atau sebesar 100,39% dari target yang ditentukan.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Realisasi penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material Triwulan IV Tahun 2024 untuk KPP Pratama Sleman sebesar 100,39% dari trajectory 100%.

Implikasi:

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) telah tercapai pada Triwulan IV Tahun 2024.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Analisis atas kegiatan pengawasan pembayaran dan pelaporan, meliputi kegiatan antara lain:
   a. Penyusunan daftar wajib pajak yang di usulkan DSP4;
   b. Surat Teguran penyampaian SPT Masa/Tahunan;
   c. Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan;
   d. Penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PPh dan PPN;
   e. Penerbitan STP atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak; dan
   f. Penerbitan STP atas permohonan Keberatan dan/atau Banding yang ditolak atau dikabulkan sebagian (Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) UU KUP).
2. Analisis angsuran masa, meliputi kegiatan penghitungan kembali angsuran PPh Pasal 25 akibat salah hitung dalam SPT Tahunan.
3. Analisis dan data matching, meliputi kegiatan antara lain analisis atas :
   a. Faktur Pajak/Bukti Potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan;
   b. Penelitian atas data pemicu, penguji, atau laporan penilaian;
   c. Pemeriksaan data konkret (single tax);
   d. Kunjungan (visit) untuk SP2DK;

e. Pemanfaatan alket;
f. Pengawasan pembayaran Bea Meterai;
g. Pengawasan atas kegiatan corporate action;
h. Penetapan NPWP/PKP secara jabatan; dan
i. Penelitian atau penerbitan SP2DK komprehensif.

4. Evaluasi SP2DK outstanding dan LHP2DK dalam pengawasan;
5. Melakukan konseling terhadap wajib pajak yang tindak/lambat respon atas penerbitan SP2DK yang masih outstanding;
6. Melakukan sinergi dengan fungsional pemeriksa dalam bedah wajib pajak yang masuk DPP dan penggalian potensi sektoral;
7. Melakukan kegiatan mirroring atas WP yang telah selesai pemeriksaan;
8. Evaluasi SPT Tahunan status RTLB untuk diusulkan pemeriksaan.

d) Edukasi dan pelayanan yang efektif

1) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Tahun	2022	2023	2024
Target	67%	70%	74%
Realisasi	80,40%	84,00%	88,80%
Capaian	120	120	120

Penjelasan Singkat:

Kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan , dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Usaha mencapai perubahan perilaku dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Implikasi:

Penyuluhan dan edukasi Wajib Pajak dilakukan menggunakan media daring maupun luring.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Melaksanakan himbauan pelaporan SPT melalui: WA Blast, Telepon, surat dan mengunjungi lokasi WP
2. Membuka loket layanan SPT Tahunan
3. Mengundang Wajib Pajak untuk dilakukan edukasi tentang kewajiban perpajakan.
4. Membuka layanan konsultasi perpajakan melalui tatap muka maupun online.

2) Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Tahun	2022	2023	2024
Target	79	81	100%
Ralisasi	85,83	83,58	107,84%
Capaian	107,29	103,19	107,84

Penjelasan Singkat:

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif pada Internal Process perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan.

Survey tersebut mengukur antara lain:

1. Indeks Kepuasan Layanan
2. Indeks Efektifitas Penyuluhan

dimana pelaksanaan Survey dilaksanakan oleh Direktorat P2Humas bekerja sama dengan pihak surveyor kepada Wajib Pajak KPP Pratama Sleman pada Triwulan IV Tahun 2024 dengan hasil 90,23 untuk Indeks Kepuasan Pelayanan dan 83,11 untuk Indeks Efektivitas Penyuluhan. Selain itu terdapat nilai Indeks KPP Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 86,67.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Usaha mencapai perubahan perilaku dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Implikasi:

Penyuluhan dan edukasi Wajib Pajak dilakukan menggunakan media daring maupun luring.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Mengadakan Sosialisasi dan penyuluhan Jemput Bola, BDS, Kelas Pajak, media surat, telepon dan WA Blast kepada Wajib Pajak KPP Pratama Sleman.
2. Mengadakan Sosialisasi dan penyuluhan secara langsung SPT Tahunan, e-bupot Unifikasi dan Pemadanan NIK di wilayah kerja KPP Pratama Sleman.
3. Mengadakan kegiatan sosialisasi melalui media *Ig Live, podcast* dan siaran radio kepada Wajib Pajak KPP Pratama Sleman.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah dan lembaga-lembaga untuk mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak secara tatap muka.

e) Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase pembayaran masa

Tahun	2022	2023	2024
Target	100,00%	90,00%	90%
Realisasi	103,55%	118,40%	120%
Capaian	115,06	120	120

Penjelasan Singkat:

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di Tahun 202$).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Realisasi untuk IKU persentase pembayaran masa mencapai nilai maksimal yaitu 120% dari target 90% dengan indeks capaian 120.

Implikasi:

Capaian persentase pembayaran masa melebihi target yang telah ditentukan.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Membuat NotHit dan LemHit untuk penerbitan STP dari pembayaran Wajib Pajak yang melewati batas jangka waktu pembayaran.
2. Memantau data dari kanwil terkait dinamisasi angsuran dan data matching.
3. Melakukan tindak lanjut data pemicu pada tahun berjalan sesuai dengan dafnom.

4. Melakukan penelitian dan usulan DSPE yang masuk dalam DSP4 serta tindak lanjut data yang bersumber dari pengamatan lapangan.
5. Menindaklanjuti semua data yang terbit di Approweb untuk tahun pajak 2024.

f) Pengujian kepatuhan material yang efektif

1) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Tahun	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100%
Realisasi	116,82%	120%	120%
Capaian	116,82	120	120

Penjelasan Singkat:

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdiri dari dua komponen:

1. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau Realisasi permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 120% dari yang ditargetkan sampai triwulan IV sebesar 100% keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) (bobot 50%)

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Realisasi permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 120% dari yang ditargetkan sampai triwulan IV sebesar 100%.

Implikasi:

Capaian atas IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah mencapai target di Triwulan IV Tahun 2024.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Melakukan penelitan terhadap wajib pajak yang menjadi prirotas pengawasan dengan menyusun daftar DSP4 dan DPP serta usulan DSP2 pada triwulan III
2. Menerbitkan SP2DK atas WP yang menjadi prioritas pengawasan yang ada dalam daftar DSP4 dan DPP pada triwulan III.
3. Menghubungi wajib pajak untuk segera membayar ataupun melaporkan pajak yang belum disetorkan dan menindaklanjuti SP2DK atas DPP.
4. Melakukan penelitian terhadap SP2DK Outstanding dengan prioritas berdasarkan bobot yang dapat dicairkan.
5. Melakukan konseling terhadap wajib pajak yang melakukan tindak lanjut atas penerbitan SP2DK baik DPP maupun outstanding.
6. Evaluasi SP2DK outstanding dan LHP2DK dalam pengawasan dan memprioritaskan tahun pajak yg mendekati daluwarsa untuk segera diselesaikan.
7. Melakukan sinergi dengan fungsional pemeriksa dalam bedah wajib pajak yang masuk DPP dan penggalian potensi sektoral.
8. Melakukan kegiatan visit atas WP yang akan diusulkan DPP sebagai bahan analisis yang komprehensif.

2) Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Tahun	2022	2023	2024
Target	-	100%	100%
Realisasi	-	118,59%	120%
Capaian	-	118,59%	120

Penjelasan Singkat:

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan ini memiliki 2 (dua) komponen yaitu Capaian pemanfaatan data STP dan Capaian pemanfaatan Data Matching yang mana masing-masing memberikan kontribusi yang sama untuk realisasi IKU tersebut. Pada Triwulan IV Tahun 2024 realisasi telah mencapai 120%.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Capaian IKU persentase tercapai 120%.

Implikasi:

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan telah tercapai pada Triwulan IV Tahun 2024.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Menerbitkan SP2DK atas WP yang memiliki data konkret berupa faktur pajak atau bukti potong.
2. Melakukan usulan pemeriksaan atas data konkret yang telah terbit SP2DK

3) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Tahun	2022	2023	2024
Target	-	-	100%
Realisasi	-	-	117,38%
Capaian	-	-	117,38

Penjelasan Singkat:

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu Kembali muncul pada Tahun 2024 dengan didalamnya memiliki komponen diantaranya Bobot 30% untuk Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan Target sebesar 100%, Bobot 40% untuk kualitas pelaksanaan komite kepatuhan dengan Target sebesar 80%, dan Bobot 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan dengan Target 55%.

Realisasi dari masing-masing komponen sebesar 120% untuk Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, 90.76% untuk kualitas pelaksanaan komite kepatuhan dan 113,82% untuk penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan, sehingga Realisasi Gabungan untuk Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 117,38% dari Target sebesar 100%.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Setiap komponen adalam IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu telah melampaui target pada Triwulan IV Tahun 2024 baik dari masing-masing komponen maupun target gabungan.

Implikasi:

Capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu telah mencapai 117,38% telah melampaui dari target yang ditetapkan.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

Melaksanakan tugas komite kepatuhan dengan lengkah-langkah yang pasti untuk memaksimalkan Pengawasan Kepatuhan Material yang ada di KPP Pratama Sleman.

g) Penegakan hukum yang efektif

1) Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tahun	2022	2023	2024
Target	80%	80%	100%
Ralisasi	110%	102,61%	120%
Capaian	120%	120,00%	120%

Penjelasan Singkat:

Pada Tahun 2024, IKU ini tidak hanya mengandung unsur pemeriksaan, namun untuk penilaian juga sudah masuk dalam perhitungan IKU ini. Dengan bobot masing masing komponennya yaitu 60% untuk Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan 40% untuk Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian. Keduanya menyumbang realisasi sebesar 120% sehingga realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 120%.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

1. Potensi DSPP dibanding dengan Realisasi SKP
2. Penyelesaian Pemeriksaan
3. Potensi Penilaian dengan Rencana dan Realisasi Kegiatan Peniaian
4. Penyelesaian Kegiatan Penilaian

Implikasi:

Capaian atas IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebesar pada Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar 120.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Pengusulan pemeriksaan melalui DSPP dan DSPPN dengan mempertimbangkan 4 kriteria yaitu indikasi ketidakpatuhan, modus ketidakpatuhan, potensi dan ketertagihan.
2. Percepatan penyelesaian pemeriksaan sebelum jatuh tempo dan sebelum berakhirnya jangka waktu pemeriksaan.
3. Mengupayakan SKP yang terbit disetujui oleh Wajib Pajak.

2) Tingkat efektivitas penagihan

Tahun	2022	2023	2024
Target	75,00%	75,00%	75%
Realisasi	113,32%	92,06%	111,09%
Capaian	120,00%	120,00%	120

Penjelasan Singkat:

Efektivitas Penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui variabel persentase realisasi tindakan penagihan yang meliputi : Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan, Pencegahan.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Daftar Nominatif DSPC triwulan I, banyak terdapat Wajib Pajak dengan kriteria macet dikarenakan perubahan status WP, pailit, PKPU, dan berstatus terpidana kasus pidana umum.

Implikasi:

1. Tindakan penagihan tidak maksimal
2. Pencairan tidak sesuai potensi DSPC

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Melakukan tindakan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan dimulai dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.Permintaan blokir, hingga sita saldo rekening
2. Mengevaluasi tindakan penagihan dan pencairan tunggakan masuk dalam daftar nominatif DSPC
3. Mengundang Wajib pajak untuk penyelesaian tunggakan pajak.

3) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tahun	2022	2023	2024
Target	-	80%	100%
Realisasi	-	117,65%	200%
Capaian	-	120	120

Penjelasan Singkat:

Pada Tahun 2024 IKU ini bergeser dari Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasn menjadi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, dimana unsur pidana menjadi temuan yang sangat penting dalam komponen pengusulan ini. Pada Tahun 2024 KPP Pratama Sleman mengirimkan 2 usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Triwulan III Tahun 2024 yang mana telah ditindakanlanjuti oleh Kanwil DJP D.I. Yogyakarta dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, sehingga realisasi atas IKU ini telah tercapai yaitu sebesar 200% dengan nilai capaian 120.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Sumber dari usulan bukti permulaan ini dapat diperoleh baik dari Seksi Pengawasan ataupun Seksi Penagihan, namun komponen tindak pidana harus kuat agar pihak Kanwil berkenan untuk menindaklanjuti atas temuan Pidana tersebut. Komunikasi yang baik antara Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan menjadi faktor utama dalam pencapaian IKU ini.

Implikasi:

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan telah tercapai sejak Triwulan III Tahun 2024.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

Usulan pemeriksaan melalui kegiatan pengawasan dan masuk pembahsan DSPP dengan mempertimbangkan 4 kriteria yaitu indikasi ketidakpatuhan, modus ketidakpatuhan, potensi dan ketertagihan.

h) Data dan informasi yang berkualitas

1) Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Tahun	2022	2023	2024
Target	-	100%	100%
Ralisasi	-	132,59%	120%
Capaian	-	120%	120

Penjelasan Singkat:

Target penyediaan data dan potensi perpajakan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 100% . Adapun realisasi penyediaan data dan potensi perpajakan sampai dengan Triwulan IV 2024 sejumlah 120%.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Realisasi penyediaan data dan potensi perpajakan sudah tercapai

Implikasi:

Penyediaan data dan potensi perpajakan sudah tercapai.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Mengalokasikan target pengukuran kinerja KPDL
2. Melaksanakan KPDL berbasis kewilayahan
3. Melakukan percepatan perekaman atas data yang telah diperoleh dengan sebelumnya memastikan kebenaran data yang akan direkam pada aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11
4. Percepatan atasan langsung dalam melakukan validasi material dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan kualitas data hasil KPDL
5. Percepatan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data dalam melakukan validasi formal dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan kualitas data hasil KPDL

2) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Tahun	2022	2023	2024
Target	-	55%	55%
Ralisasi	-	100%	100%
Capaian	-	120%	120

Penjelasan Singkat:

Target penghimpunan data regional dari ILAP Triwulan IV Tahun 2024 adalah 55%. Adapun realisasi penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar 100%.

Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

Realisasi penyediaan data dan potensi perpajakan sudah tercapai.

Implikasi:

Penyediaan data dan potensi perpajakan sudah tercapai.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

Koordinasi dengan Kanwil DJP DIY dan Pemda Kabupaten Sleman.

i) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

1) Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Tahun	2022	2023	2024
Target	80%	82%	100
Ralisasi	90,48%	98,33%	117,43
Capaian	113,10%	119,91%	117,43

Penjelasan Singkat:

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari : kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

1. Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum
3. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak

Sampai dengan Triwulan IV 2024, seluruh pegawai KPP Pratama sleman telah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selain daripada itu, untuk Tahun 2024 terdapat komponen lain yaitu Kegiatan Pembinaan Mental dimana setiap kegiatannya meminta kehadiran dari Pejabat Administrator atau Kepala KPP Pratama Sleman dimana kegiatan ini dimaksud untuk menambah interaksi dan sinergi antara pimpinan dan seluruh pegawai di KPP Pratama Sleman.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Pelaksanaan Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV , Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional, dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum ditentukan oleh Kantor Pusat

Implikasi:

Pada Triwulan IV Tahun 2024 realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yaitu sebesar 117,43 yang mana telah melampui target sebesar 100.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Mengingatkan pegawai untuk melakukan penyelesaian kegiatan pembelajaran melalui studiA maupun melalui Kemenkeu Learning Center.
2. Membuatkan penugasan untuk pegawai yang dipanggil melalui pengumuman Direktur Jenderal Pajak supaya membebaskan sementara pegawai dari pekerjaan kantor untuk dapat fokus mengikuti pembelajaran.
3. Melaksanakan berbagai kegiatan sesuai Petunjuk Teknis terkait kegiatan Pembinaan Mental.
4. Membuat Laporan dilampiri dengan berbagai hal administrasi secara tepat waktu.
5. Melaksanakan survey terkait kegiatan Pembinaan Mental sesuai dengan Nota Dinas dari Kantor Pusat.

2) Indeks Penilaian Integritas Unit

Tahun	2022	2023	2024
Target	90	85	85
Realisasi	95,72	95,06	95,74
Capaian	112,61	111,84	112,63

Penjelasan Singkat :

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut: pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA dan survei dilaksanakan oleh Kantor Wilayah.

Isu Utama dan Implikasi:

Survey Penilaian Integritas Unit dilaksanakan oleh Kantor Pusat (Direktorat KITSDA) pada periode bulan Agustus s.d Desember 2024 dengan daftar longlist calon responden survey dari KPP.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Penyampaian Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kinerja pegawai serta mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga Integritas oleh Kepala Kantor pada saat Morning Activity.
2. Pelaksanaan sosialisasi WBS dan Gratifikasi dan Sosialisasi Antikorupsi Bijak Bermedia Sosial.
3. Telah dilaksanakan pemantauan kode etik dan kode perilaku berupa sidak
4. Pelaksanaan sosialisasi HAKORDIA.

3) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Tahun	2022	2023	2024
Target	90%	90%	90
Realisasi	100,00%	99,97%	98,61
Capaian	111,11%	111,08%	109,57

Penjelasan Singkat :

Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan diperoleh dari rata-rata Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan.

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-300/KMK.01/2022.

Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-845/KMK.01/2016.

Realisasi poin unsur penilaian DKO adalah realisasi poin yang dihitung berdasarkan unsur penilaian DKO yang terpenuhi. Unsur-unsur penilaian DKO adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat, dibuktikan dengan surat undangan dan daftar hadir (10 poin)
2. Apabila DKO dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil) dan tanggal 7 Januari/April/Juli/Oktober (KPP) mendapat 10 poin; Apabila DKO dilaksanakan setelah tanggal 10 Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil) dan 7 Januari/April/Juli/Oktober

(KPP) mendapat 5 poin. Namun pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat perubahan pelaksanaan DKO yaitu maksimal tanggal 20 untuk KPP dan 25 untuk Kanwil dimana nilai NKO telah terpenuhi paling lambat tanggal 15 setiap akhir triwulannya.

3. Kehadiran kepala unit kerja selama rapat evaluasi (dibuktikan dengan foto) (20 poin)
4. Risalah Rapat (10 poin)
5. Matriks Tindak Lanjut sesuai lampiran II KMK-590/KMK.01/2016 (10 poin)
6. Laporan Pemantauan Triwulanan sesuai KMK-845/KMK.01/2016 (10 poin)
7. Umpan balik pelaksanaan Dialog Kinerja (20 poin)
8. Tingkat efektivitas waktu Dialog Kinerja kriteria Baik dengan Nilai 75<x<100 (10 poin)

Mulai Triwulan III Tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi sudah tidak melalui metode *Buttom Up Approach*, dengan adanya Dashboard Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor, maka nilai NKO saat ini sudah langsung tervalidasi dari Kantor Pusat dan diberikan dalam bentuk nilai resmi lewat dashboard tersebut. Namun apabila unit organisasi memiliki keberatan atas nilai yang muncul, Kantor Pusat masih membuka akses keberatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Unit Organisasi.

Isu Utama dan Implikasi:

Isu Utama:

Capaian Efektivitas DKO dan Penerapan Manajemen Risiko melebihi target yang telah ditentukan.

Implikasi:

Tetap melaksankan kegiatak DKO dan MR sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan:

1. Melakukan monitoring secara triwulanan untuk memastikan seluruh seksi telah melaksanakan mitigasi risiko sesuai dengan yang telah disepakati.
2. Pelaksanaan rapat DKO setiap triwulanan.

j) Sasaran Strategis (SS) 11 : Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

1) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tahun	2022	2023	2024
Target	95,50%	100%	100
Ralisasi	93,21%	102,57%	120
Capaian	97,60%	102,57%	120

Penjelasan Singkat:

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di triwulan IV menggunakan rumus dengan 50% berasal dari nilai capaian IKU IKPA dan 50% dari nilai SMART dari DJA. Pada Triwulan IV 2024, capaian IKPA sebesar 97,92% dan SMART sebesar 100%, sehingga realisasi untuk triwulan IV sebesar 98,96% dari target yang ditetapkan sebesar 91% dengan capaian 120%.

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian Triwulan IV
A	**Nilai IKPA**		48,96%
	1	Revisi DIPA	100%
	2	Deviasi Hal III DIPA	94,14%
	3	Penyerapan Anggaran	96,06%
	4	Belanja Kontraktual	-
	5	Penyelesaian Tagihan	-
	6	Pengelolaan UP dan TUP	100%
	7	Dispensasi SPM	-
	8	Capaian Output	100%
B	**Nilai SMART**		50%
	Nilai Capaian IKU PKPA Triwulan IV		**98,96%**

Isu Utama:

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ;

Implikasi:

IKKPA mencapai target yang telah ditentukan

Akar Masalah

Revisi DIPA tambahan belanja modal di triwulan IV tahun 2024.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Terus saling berkoordinasi untuk melaksanakan tiap aspek penilaian dan melakukan revisi DIPA sesuai jadwal revisi.

4. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja

Mitigasi Risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi risiko, menyusun rencana mitigasi risiko dan melaksanakan rencana mitigasi.

Prioritas risiko yang telah disusun pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Risiko 1

Nama Risiko : Realisasi Penerimaan Pajak tidak mencapai target.

Rencana Mitigasi Risiko :

1. Melaksanakan monitoring perkembangan/capaian atas rencana kerja pengamanan realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

   Rencana mitigasi risiko dilaksanakan dalam bentuk melakukan monitoring atas capaian penerimaan pajak yang dilakukan setiap bulan dan memiliki output berupa 12 laporan dan kesemuanya telah terlaksana atau 100% dari target kegiatan.
2. Menyelenggarakan sharing session/bimbingan/coaching yang diinisiasi oleh kanwil dan mengundang kepala seksi dan AR .

   Rencana mitigasi risiko dilaksanakan dalam bentuk kegiatan *coaching* yang ditargetkan sebanyak 6 kegiatan dan telah terlaksana sebanyak 6 kegiatan atau 100% dari target kegiatan.

b. Prioritas Risiko 2

Nama Risiko : Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai.

Rencana Mitigasi Risiko :

1. Melakukan Pengawasan Kewajiban Pelaporan SPT dan Tindak Lanjutnya.

   Rencana mitigasi risiko dilaksanakan dalam bentuk pengawasan atas pelaporan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh tiap Seksi Pengawasan dan ditargetkan sebanyak 12 laporan dan telah tercapai 100% dari target laporan.
2. Menerbitkan Surat Teguran

   Rencana mitigasi risiko dilaksanakan dalam bentuk laporan jumlah Surat Teguran yang telah diterbitkan dan dilaporkan triwulanan, dengan target sebanyak 3000 Surat Teguran dan telah di terbitkan 9322 STP
3. Menerbitkan STP

   Rencana mitigasi risiko dilaksanakan dalam bentuk laporan jumlah STP yang telah diterbitkan dan dilaporkan triwulanan, dengan target sebanyak 1500 dan telah terbit 1792 STP.

c. Prioritas Risiko 3

Nama Risiko : Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target.

Rencana Aksi Penanganan Risiko :

1. Melakukan monitoring tindak lanjut pemanfaatan data

   Rencana mitigasi risiko dilaksanakan dalam bentuk laporan monitoring pemanfaatan data yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dan telah terlaksana sebanyak 4 laporan atau 100% dari target kegiatan.
2. Melaksanakan sistem pengawasan pelaksanaan strategi pengamanan penerimaan pajak

   Rencana mitigasi risiko dilaksanakan dalam bentuk laporan SP2DK yang ditargetkan sebanyak 12 laporan dan telah terlaksana sebanyak 12 laporan atau 100% dari target kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas analisis data Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan

   Rencana mitigasi risiko dilaksanakan dalam bentuk laporan tinjauan kegiatan yang telah dilakukan setiap Seksi Pengawasan dalam memilih Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan, ditargetkan sebanyak 12 laporan dan telah terlaksana sebanyak 12 laporan atau 100% dari target kegiatan.
4. Koordinasi dengan Fungsional pemeriksa, baik KPP maupun Kanwil, komitmen Wajib Pajak atas hasil Pemeriksaan

   Rencana mitigasi risiko dilaksanakan dalam bentuk usulan WP yang akan di lakukan pemeriksaan dengan targert 12 usulan dan terlakasana 12 usulan.
5. Peningkatan Kegiatan Penagihan Aktif

   Rencana mitigasi resiko dengan melaporkan setiap triwulan kegiatan aktif yang telah di lakukan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan dan terlaksana 4 laporan yang di laporkan setiap triwulan
6. Mengundang Wajib Pajak untuk melunasi piutang pajak

   Rencana Mitigasiresiko dengan Mengundang Wajib Pajak untuk
   melunasi piutang pajak dengan target 100 Undangan dan selama satu tahun telah terbit 421 undangan

d. Prioritas Risiko 4

Nama Risiko : Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan.

Rencana Mitigasi Risiko :

1. Melakukan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Survey kepada Wajib Pajak yang telah dilakukan kunjungan oleh petugas pajak

2. Melakukan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Survey kepada Wajib Pajak yang telah dilakukan kunjungan oleh Pegawai UKI yang di targetkan 3 dan sudah terlaksana 3 survei yang dilaksanakan selama tahun 2024

5. Kinerja Lainnya

Beberapa Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi KPP Pratama Sleman antara lain:

a. Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

KPP Pratama Sleman meraih penghargaan Peringkat III Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2024 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta nomor KEP-177/WPJ.23/2024.

b. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

KPP Pratama Sleman berhasil mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 21 Desember 2020.

Proses untuk pembangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dimulai sejak tahun 2018 dengan pencananangan ZI 2018. Pembangunan ZI WBK di KPP Pratama Sleman terus dilakukan secara konsisten sampai dengan tahun 2020 dengan keikutsertaan KPP Pratama Sleman dalam seleksi Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dimulai dari tingkat Direktorat Jenderal Pajak, Tingkat Kementerian Keuangan, dan Tingkat Nasional yang dinilai langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

c. Layanan Jemput Bola (Jempol) SPT Tahunan

Dalam rangka memberikan pelayanan prima dan kemudahan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023, pada tahun 2024 KPP Pratama Sleman membuat layanan jemput bola (jempol) SPT Tahunan yang telah dilaksanakan diseluruh kecamatan, kelurahan, serta beberapa pusat perbelanjaan di wilayah kerja KPP Pratama Sleman. Layanan jemput bola dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dimasa pandemi covid-19.

d. Pelayanan Perpajakan Tertenu di Mal Pelayanan Publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sleman

KPP Pratama Sleman memberikan pelayanan perpajakan tertentu di Mal Pelayanan Publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sleman meliputi kegiatan:

1) Cetak kartu NPWP Pribadi (termasuk cetak NPWP Istri);
2) Aktivasi EFIN OP;
3) Pembuatan Kode Billing;
4) Konsultasi KSWP; dan
5) Konsultasi Perpajakan Terbatas.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan KPP Pratama Sleman tahun 2024, diperlukan sumber dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA KPP Pratama Sleman sebesar Rp 5,655,805,000,- dan telah terserap sebesar 98,94% atau Rp 5.596.126.459,-. Pada Tahun 2024 KPP Pratama Sleman mengalami revisi DIPA sebanyak 11 kali. Hal tersebut berkaitan dengan Penyesuaian hal III DIPA, Penambahan dipa untuk belanja modal dan Pengembalian Anggaran untuk Menutup Pagu Minus Belanja Pegawai Kementerian Keuangan. Sumber dana tersebut dibagi ke dalam output kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Hasil PermintaaPenjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka Ekstensifikasi.

   Anggaran untuk rincian output Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka Ekstensifikasi dialokasikan sebesar Rp 157.164.000,- digunakan untuk kegiatan penyuluhan dan pelayanan terkait kegiatan Ekstensifikasi di KPP Pratama Sleman. Dana tersebut terserap sebesar 99,96% atau sebesar Rp157.094.402,-.
2. Formulir Kegiatan Pengumpulan Data

   Anggaran untuk Rincian Output Formulir Kegiatan Pengumpulan Data dialokasikan sebesar Rp 263.870.000,- digunakan untuk kegiatan pengumpulan data wajiib pajak yang ada diwilayah kerja KPP Pratama Sleman. Dana tersebut terserap sebesar 99,95% atau sebesar Rp 263.743.622,-
3. Layanan dan Konsultasi Perpajakan

   Anggaran untuk Rincian Output Layanan dan Konsultasi Perpajakan dialokasikan sebesar Rp 372.285.000,- digunakan untuk untuk membiayai kegiatan penerimaan SPT Tahunan, pengawasan, penagihan, kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dan serta kegiatan pendukung lainnya. Dana tersebut terserap sebesar 99,66% atau sebesar Rp. 108.589.851,-
4. Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan

   Anggaran untuk Rincian Output Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan dialokasikan sebesar Rp 110.665.000,- digunakan untuk penyediaan sarana dan prasana terkait dengan kegiatan penyuluhan perpajakan dan serta kegiatan pendukung lainnya. Dana tersebut terserap sebesar 98,12% atau sebesar Rp 108,589,851,-
5. Dokumen Penagihan Aktif

   Anggaran untuk Rincian Output Dokumen Penagihan Aktif dialokasikan sebesar Rp 120.441.000,- digunakan untuk membiayai kegiatan seluruh terkait dengan penagihan pajak dan serta kegiatan pendukung lainnya. Dana tersebut terserap sebesar 99.97% atau sebesar Rp 120.406.503,-
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan

Anggaran untuk Rincian Output Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan dialokasikan sebesar Rp 43.323.000,- digunakan untuk membiayai kegiatan terkait dengan pemeriksaan wajib pajak dan serta kegiatan pendukung pemeriksaan lainnya. Dana tersebut terserap sebesar 99,94% atau sebesar Rp 43.295.565,-

7. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka Pengawasan

   Anggaran untuk Rincian Output Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dialokasikan sebesar Rp244.324.000,- digunakan untuk membiayai kegiatan visit terkait pengawasan Wajib Pajak dan dan serta kegiatan pendukung pengawasan lainnya. Dana tersebut terserap sebesar 99,98% atau sebesar Rp244.263.555,-

8. Laporan Penilaian

   Anggaran untuk Rincian Output Penilaian dialokasikan sebesar Rp33.539.000,- digunakan untuk membiayai kegiatan penilaian terkait Wajib Pajak dan dan serta kegiatan pendukung penilaian lainnya. Dana tersebut terserap sebesar 95,69% atau sebesar Rp32.093.430,-

9. Operasionalisasi Kantor

   Anggaran untuk Rincian Output Operasionalisasi Kantor dialokasikan sebesar Rp2.201.839.000 digunakan untuk membiayai seluruh operasional kantor, untuk mencukupi seluruh kebutuhan sehari-hari perkantoran dan serta kegiatan pendukung lainnya. Dana tersebut terserap sebesar 98,38% atau sebesar Rp2.166.191.535,-

10. Kerumahtanggaan

    Anggaran untuk Rincian Output Kerumahtanggaan dialokasikan sebesar Rp106.519.000,- digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi dengan sesama satker eselon I atau satker lain dan serta kegiatan pendukung lainnya. Dana tersebut terserap sebesar 93,77% atau sebesar Rp99,881,872,-

11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

    Anggaran untuk Rincian Output Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp408.862.000,- digunakan untuk membiayai seluruh kendaraan dinas, mesin inventaris kantor dan serta peralatan pendukung lainnya. Dana tersebut terserap sebesar 98,45% atau sebesar Rp402.532.587,-

12. Peralatan Fasilitas Perkantoran

    Anggaran untuk Rincian Output Peralatan Fasilitas Perkantoran dialokasikan sebesar Rp609.497.000,- digunakan untuk membiayai pengadaan belanja modal peralatan dan mesin. Dana tersebut terserap sebesar 99,85% atau sebesar Rp608.612.440,-

13. Gaji dan Tunjangan

    Anggaran untuk Rincian Output Gaji dan Tunjangan dialokasikan sebesar Rp983.477.000,- digunakan untuk membayar belanja gaji pegawai selama 12 bulan dengan penyerapan sebesar 99,48% atau sebesar Rp978.396.000,- .

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Sleman merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Sleman mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Instansi yang bertugas mengumpulkan penerimaan Negara, KPP Pratama Sleman berusaha menjalankan tugas dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, tugas mengumpulkan penerimaan Negara dirasakan semakin banyak menghadapi tantangan. Namun demikian KPP Pratama Sleman behasil mengatasi tantangan dan hal itu tampak pada keberhasilan KPP Pratama Sleman dalam mencapai beberapa target yang ditetapkan dalam IKU tahun 2024

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Sleman dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan pajak sesuai target yang ditetapkan
2. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Sleman
3. Meningkatkan kinerja dan pelayanan pegawai kepada wajib pajak
4. Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan pegawai

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait tugas, fungsi sehingga dapat memberikan umpan balik guna meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Sleman, 24 Januari 2024

. Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Moch. Luqman Hakim

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA 2024

a. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sleman Triwulan IV Tahun 2024
b. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN Tingkat Satuan Kerja
c. Matriks Tindak Lanjut Rencana Aksi Tahun 2024 KPP Pratama Sleman
d. Piagam Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)
e. Piagam Perhargaan Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kantor Pelayanan Terbaik III

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KPP KPP PRATAMA SLEMAN
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	101,54
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,54
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,04%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,61	Max	P/L	19,00%	42,22%	103,61
	Customer Perspective						20,00%	103,75
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,11
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,02%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,02
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	116,82%	Max	P/L	19,00%	42,22%	116,82
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,39
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,39%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,39
	Internal Process Perspective						25,00%	118,61
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,92
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,84%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,84
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,12
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,38%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,38
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	111,09%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,60
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,20
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,43	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,43
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,63
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,61	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							110,01

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 635794 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**5,655,805,000**	**0**	**4,969,231,553**	**626,894,906**	**5,596,126,459**	**98.94 %**	**59,678,541**
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,345,611,000	0	1,230,993,490	109,518,535	1,340,512,025	99.62 %	5,098,975
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	421,034,000	0	401,388,174	19,449,850	420,838,024	99.95 %	195,976
BMA Data dan Informasi Publik	421,034,000	0	401,388,174	19,449,850	420,838,024	99.95 %	195,976
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	157,164,000	0	140,244,552	16,849,850	157,094,402	99.96 %	69,598
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	157,164,000	0	140,244,552	16,849,850	157,094,402	99.96 %	69,598
005.0A KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	157,164,000	0	140,244,552	16,849,850	157,094,402	99.96 %	69,598
521211 Belanja Bahan	73,100,000	0	56,257,500	16,799,850	73,057,350	99.94 %	42,650
000003. Makan Rapat Biasa	14,520,000	0	14,508,000	0	14,508,000	99.92 %	12,000
000004. Snack Rapat Biasa	2,320,000	0	2,315,500	0	2,315,500	99.81 %	4,500
000087. Sarana dan prasaran ekstensifikasi	56,260,000	0	39,434,000	16,799,850	56,233,850	99.95 %	26,150
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,764,000	0	41,697,052	50,000	41,747,052	99.96 %	16,948
000005. Perjalanan dinas biasa	41,764,000	0	41,697,052	50,000	41,747,052	99.96 %	16,948
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,300,000	0	42,290,000	0	42,290,000	99.98 %	10,000
000006. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	42,300,000	0	42,290,000	0	42,290,000	99.98 %	10,000
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	263,870,000	0	261,143,622	2,600,000	263,743,622	99.95 %	126,378
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	263,870,000	0	261,143,622	2,600,000	263,743,622	99.95 %	126,378
005.0A KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	263,870,000	0	261,143,622	2,600,000	263,743,622	99.95 %	126,378
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113,420,000	0	113,333,622	0	113,333,622	99.92 %	86,378
000001. Perjalanan dinas biasa	113,420,000	0	113,333,622	0	113,333,622	99.92 %	86,378
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,450,000	0	147,810,000	2,600,000	150,410,000	99.97 %	40,000
000002. Uang transport kegiatan dalma kota Pulang Pergi (PP)	150,450,000	0	147,810,000	2,600,000	150,410,000	99.97 %	40,000
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	482,950,000	0	437,995,263	41,619,685	479,614,948	99.31 %	3,335,052
BMB Komunikasi Publik	482,950,000	0	437,995,263	41,619,685	479,614,948	99.31 %	3,335,052
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	372,285,000	0	339,398,512	31,626,585	371,025,097	99.66 %	1,259,903
100 Tidak Ada Komponen	372,285,000	0	339,398,512	31,626,585	371,025,097	99.66 %	1,259,903

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 635794 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
100.0A KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	372,285,000	0	339,398,512	31,626,585	371,025,097	99.66 %	1,259,903
521211 Belanja Bahan	237,145,000	0	211,268,929	25,502,085	236,771,014	99.84 %	373,986
000012. Makan Rapat Biasa	23,450,000	0	23,439,000	0	23,439,000	99.95 %	11,000
000013. Snack Rapat Biasa	30,992,000	0	30,916,628	0	30,916,628	99.76 %	75,372
000014. SMS Masking	48,603,000	0	41,940,501	6,632,501	48,573,002	99.94 %	29,998
000015. Seminar kit	101,300,000	0	82,259,000	18,869,584	101,128,584	99.83 %	171,416
000085. Sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	32,800,000	0	32,713,800	0	32,713,800	99.74 %	86,200
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	122,400,000	0	115,576,850	6,124,500	121,701,350	99.43 %	698,650
000016. Inhouse Training	54,000,000	0	51,912,980	1,444,500	53,357,480	98.81 %	642,520
000017. ICV	68,400,000	0	63,663,870	4,680,000	68,343,870	99.92 %	56,130
522141 Belanja Sewa	12,740,000	0	12,552,733	0	12,552,733	98.53 %	187,267
000019. Sewa kursi	500,000	0	400,000	0	400,000	80.00 %	100,000
000021. Sewa printer	12,240,000	0	12,152,733	0	12,152,733	99.29 %	87,267
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	110,665,000	0	98,596,751	9,993,100	108,589,851	98.12 %	2,075,149
100 Tanpa Komponen	110,665,000	0	98,596,751	9,993,100	108,589,851	98.12 %	2,075,149
100.0A KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	110,665,000	0	98,596,751	9,993,100	108,589,851	98.12 %	2,075,149
521211 Belanja Bahan	67,972,000	0	62,122,380	5,607,000	67,729,380	99.64 %	242,620
000007. Makan Rapat Biasa	15,680,000	0	12,254,500	3,392,000	15,646,500	99.79 %	33,500
000008. Snack Rapat Biasa	12,192,000	0	9,893,580	2,215,000	12,108,580	99.32 %	83,420
000009. Sarana dan prasarana penyuluhan	40,100,000	0	39,974,300	0	39,974,300	99.69 %	125,700
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
000010. Honoarium narasumber / Pembahas	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	40,893,000	0	36,474,371	4,386,100	40,860,471	99.92 %	32,529
000011. Iklan/spanduk/banner	40,893,000	0	36,474,371	4,386,100	40,860,471	99.92 %	32,529
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	441,627,000	0	391,610,053	48,449,000	440,059,053	99.64 %	1,567,947
BCE Penanganan Perkara	120,441,000	0	97,756,503	22,650,000	120,406,503	99.97 %	34,497
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	120,441,000	0	97,756,503	22,650,000	120,406,503	99.97 %	34,497

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 635794 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
100 Tidak Ada Komponen	120,441,000	0	97,756,503	22,650,000	120,406,503	99.97 %	34,497
100.0A KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	120,441,000	0	97,756,503	22,650,000	120,406,503	99.97 %	34,497
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	106,900,000	0	84,250,000	22,650,000	106,900,000	100.00	0
000022. Biaya Penyampaian Surat Paksa	106,900,000	0	84,250,000	22,650,000	106,900,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,541,000	0	13,506,503	0	13,506,503	99.75 %	34,497
000024. Perjalanan dinas biasa	13,541,000	0	13,506,503	0	13,506,503	99.75 %	34,497
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	321,186,000	0	293,853,550	25,799,000	319,652,550	99.52 %	1,533,450
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	43,323,000	0	38,035,565	5,260,000	43,295,565	99.94 %	27,435
100 Tidak Ada Komponen	43,323,000	0	38,035,565	5,260,000	43,295,565	99.94 %	27,435
100.0A KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	43,323,000	0	38,035,565	5,260,000	43,295,565	99.94 %	27,435
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,823,000	0	27,535,565	5,260,000	32,795,565	99.92 %	27,435
000025. Belanja perjalanan dinas biasa	32,823,000	0	27,535,565	5,260,000	32,795,565	99.92 %	27,435
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
000026. Uang transport kegiatan dalma kota Pulang Pergi (PP)	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	244,324,000	0	225,374,555	18,889,000	244,263,555	99.98 %	60,445
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	244,324,000	0	225,374,555	18,889,000	244,263,555	99.98 %	60,445
005.0A KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	244,324,000	0	225,374,555	18,889,000	244,263,555	99.98 %	60,445
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	91,474,000	0	78,174,555	13,299,000	91,473,555	100.00	445
000030. Perjalanan dinas biasa	91,474,000	0	78,174,555	13,299,000	91,473,555	100.00	445
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	152,850,000	0	147,200,000	5,590,000	152,790,000	99.96 %	60,000
000031. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	152,850,000	0	147,200,000	5,590,000	152,790,000	99.96 %	60,000
BIG.005 Laporan Penilaian	33,539,000	0	30,443,430	1,650,000	32,093,430	95.69 %	1,445,570
100 Tidak Ada Komponen	33,539,000	0	30,443,430	1,650,000	32,093,430	95.69 %	1,445,570
100.0A KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	33,539,000	0	30,443,430	1,650,000	32,093,430	95.69 %	1,445,570
521211 Belanja Bahan	1,400,000	0	0	0	0	0.00 %	1,400,000
000027. Belanja bahan	1,400,000	0	0	0	0	0.00 %	1,400,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 635794 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,189,000	0	16,503,430	1,650,000	18,153,430	99.80 %	35,570
000028. Perjalanan dinas biasa	18,189,000	0	16,503,430	1,650,000	18,153,430	99.80 %	35,570
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,950,000	0	13,940,000	0	13,940,000	99.93 %	10,000
000029. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	13,950,000	0	13,940,000	0	13,940,000	99.93 %	10,000
WA Program Dukungan Manajemen	4,310,194,000	0	3,738,238,063	517,376,371	4,255,614,434	98.73 %	54,579,566
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3,326,717,000	0	2,896,021,063	381,197,371	3,277,218,434	98.51 %	49,498,566
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,717,220,000	0	2,341,778,063	326,827,931	2,668,605,994	98.21 %	48,614,006
EBA.001 Kerumahtanggaan	106,519,000	0	95,408,072	4,473,800	99,881,872	93.77 %	6,637,128
100 Tidak Ada Komponen	106,519,000	0	95,408,072	4,473,800	99,881,872	93.77 %	6,637,128
100.0A KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	106,519,000	0	95,408,072	4,473,800	99,881,872	93.77 %	6,637,128
521211 Belanja Bahan	22,150,000	0	14,544,491	4,473,800	19,018,291	85.86 %	3,131,709
000071. Makan rapat biasa	10,450,000	0	5,961,500	1,360,000	7,321,500	70.06 %	3,128,500
000072. Snack rapat biasa	11,700,000	0	8,582,991	3,113,800	11,696,791	99.97 %	3,209
522151 Belanja Jasa Profesi	5,300,000	0	1,800,000	0	1,800,000	33.96 %	3,500,000
000073. Honorarium Rohaniwan	800,000	0	0	0	0	0.00 %	800,000
000074. honorarium Narasumber	4,500,000	0	1,800,000	0	1,800,000	40.00 %	2,700,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,069,000	0	79,063,581	0	79,063,581	99.99 %	5,419
000075. Perjalanan dinas biasa	79,069,000	0	79,063,581	0	79,063,581	99.99 %	5,419
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,610,701,000	0	2,246,369,991	322,354,131	2,568,724,122	98.39 %	41,976,878
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,610,701,000	0	2,246,369,991	322,354,131	2,568,724,122	98.39 %	41,976,878
002.0A KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	2,610,701,000	0	2,246,369,991	322,354,131	2,568,724,122	98.39 %	41,976,878
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	825,199,000	0	755,295,641	61,369,753	816,665,394	98.97 %	8,533,606
000032. Pakaian Dinas Pegawai	151,620,000	0	151,620,000	0	151,620,000	100.00	0
000033. Pakaian Kerja Petugas Kebersihan/Pramubakti	4,264,000	0	4,262,400	0	4,262,400	99.96 %	1,600
000034. Pakaian Kerja Satpam	9,640,000	0	9,629,250	0	9,629,250	99.89 %	10,750
000035. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti	229,320,000	0	211,680,000	17,640,000	229,320,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 635794 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000036. Honorarium Satpam dan Pengemudi	157,625,000	0	145,500,000	12,125,000	157,625,000	100.00	0
000037. Keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai	183,360,000	0	175,212,991	8,066,753	183,279,744	99.96 %	80,256
000038. Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	54,600,000	0	34,411,000	16,458,000	50,869,000	93.17 %	3,731,000
000039. Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	14,520,000	0	7,230,000	2,580,000	9,810,000	67.56 %	4,710,000
000040. Jasa dokter klinik	20,250,000	0	15,750,000	4,500,000	20,250,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	279,714,000	0	232,940,489	30,531,263	263,471,752	94.19 %	16,242,248
000041. Pengiriman Surat Dinas	279,714,000	0	232,940,489	30,531,263	263,471,752	94.19 %	16,242,248
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	61,200,000	0	45,048,000	15,300,000	60,348,000	98.61 %	852,000
000042. Honorarium Anggota Petugas (UAKPA/Barang)	1,620,000	0	1,260,000	360,000	1,620,000	100.00	0
000043. Honorarium Staf Pengelola	6,144,000	0	4,608,000	1,536,000	6,144,000	100.00	0
000044. Honorarium Bendahara Pengeluaran	4,128,000	0	3,096,000	1,032,000	4,128,000	100.00	0
000045. Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	1,920,000	0	1,200,000	480,000	1,680,000	87.50 %	240,000
000046. Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	1,200,000	0	900,000	300,000	1,200,000	100.00	0
000047. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan Spm	4,572,000	0	2,772,000	1,188,000	3,960,000	86.61 %	612,000
000048. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	12,432,000	0	9,324,000	3,108,000	12,432,000	100.00	0
000049. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18,144,000	0	13,608,000	4,536,000	18,144,000	100.00	0
000050. Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	1,440,000	0	1,080,000	360,000	1,440,000	100.00	0
000051. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	1,440,000	0	1,080,000	360,000	1,440,000	100.00	0
000086. Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	0	6,120,000	2,040,000	8,160,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	2,463,000	0	2,057,000	17,000	2,074,000	84.21 %	389,000
000052. Penggandaan dan penjilidan	2,463,000	0	2,057,000	17,000	2,074,000	84.21 %	389,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	685,140,000	0	558,736,688	121,387,750	680,124,438	99.27 %	5,015,562
000053. Barang Cetakan	240,000,000	0	185,733,000	49,287,500	235,020,500	97.93 %	4,979,500
000054. Barang Konsumsi ATK	192,000,000	0	184,839,000	7,137,500	191,976,500	99.99 %	23,500
000055. Obat-obatan	40,950,000	0	40,945,388	0	40,945,388	99.99 %	4,612
000056. Perlengkapan Fotokopi/Komputer	212,190,000	0	147,219,300	64,962,750	212,182,050	100.00	7,950

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 635794 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522112 Belanja Langganan Telepon	60,240,000	0	54,248,145	4,895,933	59,144,078	98.18 %	1,095,922
000058. Langganan Telepon	60,240,000	0	54,248,145	4,895,933	59,144,078	98.18 %	1,095,922
522141 Belanja Sewa	255,622,000	0	214,866,018	37,466,855	252,332,873	98.71 %	3,289,127
000059. Sewa Mesin Fotokopi	174,600,000	0	145,661,526	25,997,643	171,659,169	98.32 %	2,940,831
000060. Sewa pengharum ruangan	46,800,000	0	38,679,492	7,772,912	46,452,404	99.26 %	347,596
000061. Sewa tanaman hias	34,222,000	0	30,525,000	3,696,300	34,221,300	100.00	700
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32,261,000	0	32,031,000	0	32,031,000	99.29 %	230,000
000062. Pemeliharaan Halaman Gedung Bangunan	2,870,000	0	2,640,000	0	2,640,000	91.99 %	230,000
000063. Pemeliharaan gedung	29,391,000	0	29,391,000	0	29,391,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	408,862,000	0	351,147,010	51,385,577	402,532,587	98.45 %	6,329,413
000064. Pemeliharaan AC Split	12,200,000	0	4,405,000	7,770,000	12,175,000	99.80 %	25,000
000065. Pemeliharaan Inventaris Kantor	9,280,000	0	9,060,000	0	9,060,000	97.63 %	220,000
000066. Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook	74,460,000	0	71,658,418	2,080,600	73,739,018	99.03 %	720,982
000067. Pemeliharaan Printer	10,856,000	0	3,883,000	6,882,000	10,765,000	99.16 %	91,000
000068. Pemeliharaan tabung pemadam api	4,500,000	0	4,251,300	0	4,251,300	94.47 %	248,700
000069. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	27,370,000	0	20,976,500	4,487,887	25,464,387	93.04 %	1,905,613
000070. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	208,080,000	0	207,949,348	0	207,949,348	99.94 %	130,652
000111. Biaya perbaikan kursi	23,914,000	0	8,963,444	11,973,300	20,936,744	87.55 %	2,977,256
000112. Pemeliharaan jaringan UPS	38,202,000	0	20,000,000	18,191,790	38,191,790	99.97 %	10,210
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	609,497,000	0	554,243,000	54,369,440	608,612,440	99.85 %	884,560
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	609,497,000	0	554,243,000	54,369,440	608,612,440	99.85 %	884,560
100 Tidak Ada Komponen	609,497,000	0	554,243,000	54,369,440	608,612,440	99.85 %	884,560
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	609,497,000	0	554,243,000	54,369,440	608,612,440	99.85 %	884,560
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609,497,000	0	554,243,000	54,369,440	608,612,440	99.85 %	884,560
000088. Kursi Pegawai	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000	100.00	0
000089. Kursi Hadap	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 635794 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000090. Kursi Kepala Seksi	49,800,000	0	49,800,000	0	49,800,000	100.00	0
000092. Wireless Microphone Clip On	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000	100.00	0
000093. Mesin Penghancur Kertas	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000	100.00	0
000094. Mic Wireless Conference	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0
000095. Workstasion kasi 282x10x160 cm	15,370,000	0	15,370,000	0	15,370,000	100.00	0
000096. Workstasion kasi 160x10x160 cm	10,070,000	0	10,070,000	0	10,070,000	100.00	0
000099. Meja kerja staf 140x70x75 cm	48,960,000	0	48,960,000	0	48,960,000	100.00	0
000100. Mobile drawer meja kerja 40x45x60 cm	48,880,000	0	48,880,000	0	48,880,000	100.00	0
000101. Meja kerja kasi	5,565,000	0	5,565,000	0	5,565,000	100.00	0
000102. Meja samping kasi	3,774,000	0	3,774,000	0	3,774,000	100.00	0
000103. Almari arsip	41,600,000	0	41,600,000	0	41,600,000	100.00	0
000106. Meja kerja staf 120x60x75 cm	39,375,000	0	39,375,000	0	39,375,000	100.00	0
000108. Almari loker staf dan ATK	26,260,000	0	26,260,000	0	26,260,000	100.00	0
000113. Workstasion ruang konsultasi	35,350,000	0	35,350,000	0	35,350,000	100.00	0
000114. Pintu ruang konsultasi	3,535,000	0	3,535,000	0	3,535,000	100.00	0
000115. Meja konsultasi	2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	100.00	0
000116. Kursi konsultasi	14,200,000	0	14,200,000	0	14,200,000	100.00	0
000121. AC Split 1,5 PK	31,704,000	0	31,704,000	0	31,704,000	100.00	0
000122. Kursi Rapat Aula	10,440,000	0	0	10,438,440	10,438,440	99.99 %	1,560
000123. Televisi 32	8,400,000	0	0	8,100,000	8,100,000	96.43 %	300,000
000124. Mixer Soundsystem	13,632,000	0	0	13,530,000	13,530,000	99.25 %	102,000
000125. Equalizer Soundsystem	4,100,000	0	0	4,058,000	4,058,000	98.98 %	42,000
000126. Crossover Soundsystem	3,000,000	0	0	2,941,000	2,941,000	98.03 %	59,000
000127. Speaker Ruang Rapat	10,875,000	0	0	10,552,000	10,552,000	97.03 %	323,000
000128. Power Amplifier	4,807,000	0	0	4,750,000	4,750,000	98.81 %	57,000
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	983,477,000	0	842,217,000	136,179,000	978,396,000	99.48 %	5,081,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	983,477,000	0	842,217,000	136,179,000	978,396,000	99.48 %	5,081,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 635794 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA.994 Layanan Perkantoran	983,477,000	0	842,217,000	136,179,000	978,396,000	99.48 %	5,081,000
001 Gaji dan Tunjangan	983,477,000	0	842,217,000	136,179,000	978,396,000	99.48 %	5,081,000
001.0A KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	983,477,000	0	842,217,000	136,179,000	978,396,000	99.48 %	5,081,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	843,098,000	0	707,168,000	131,199,000	838,367,000	99.44 %	4,731,000
000076. Belanja uang makan PNSGol. IV	97,416,000	0	77,695,000	18,942,000	96,637,000	99.20 %	779,000
000077. Belanja uang makan PNS Gol. III	661,227,000	0	560,698,000	99,937,000	660,635,000	99.91 %	592,000
000078. Belanja uang makan PNS Gol. II	84,455,000	0	68,775,000	12,320,000	81,095,000	96.02 %	3,360,000
512211 Belanja Uang Lembur	140,379,000	0	135,049,000	4,980,000	140,029,000	99.75 %	350,000
000079. Uang lembur Gol. IV	11,304,000	0	11,304,000	0	11,304,000	100.00	0
000080. Uang lembur Gol. II	21,398,000	0	16,488,000	4,560,000	21,048,000	98.36 %	350,000
000081. Uang lembur Gol. III	83,790,000	0	83,790,000	0	83,790,000	100.00	0
000082. Uang makan PNS Gol I II	2,940,000	0	2,520,000	420,000	2,940,000	100.00	0
000083. Uang makan PNS Gol. III	18,241,000	0	18,241,000	0	18,241,000	100.00	0
000084. Uang makan Gol IV	2,706,000	0	2,706,000	0	2,706,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

MATRIKS TINDAK LANJUT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA
KPP PRATAMA SLEMAN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Matriks Tindak Lanjut						
No	**Rencana Aksi**	**Unit Penanggung Jawab**		**Target Waktu Penyelesaian**	**Status Penyelesaian**	**Keterangan**
		Penanggung Jawab	**Bukti Pendukung**			
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal / 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak *)						
1	Melakukan profilling atau Bedah Wajib Pajak yang berguna agar AR dapat memahami proses bisnis wajib pajak dan	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	Approweb	Januari - Desember 2024	Selesai	
2	Melanjutkan penerbitan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Wajib Pajak		STP		Selesai	
3	Mempertajam penguasaan wilayah pengawasan dengan melakukan pengamatan lapangan dan Melakukan kunjungan kerja/visit ke lokasi usaha wajib pajak untuk semakin memahami proses bisnis wajib pajak.		Surat Tugas/ Laporan Visit		Selesai	
dst...						
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal / 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas						
1	Melakukan penggalian potensi Wajib Pajak	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Laporan Hasil Profilir	Januari - Desember 2024	Selesai	
2	Memberikan data potensi perpajakan yang lebih presisi		Approweb		Selesai	
3						
dst...						
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi / 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)						
1	pengawasan dan dinamisasi setoran PPh 25 (monitoring kepatuhan pembayaran dan pelaporan serta perkembangan usaha WP)	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	Laporan Hasil Profilir	Januari - Desember 2024	Selesai	
2	pengawasan atas aksi korporasi yang berlangsung dalam tahun berjalan		Laporan Hasil Profiling WP		Selesai	
3	Manajemen Restitusi		Approweb/ SIDJP		Selesai	
dst...						
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi / 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
1	Outbound call kegiatannya berupa menghubungi wajib pajak melalui telefon secara langsung agar segera melaporkan SPT Tahunan PPh	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI Seksi Pelayanan		Januari - Desember 2024	Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
2	Sosialisasi dan publikasi secara massif melalui penyuluhan maupun himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh melalui wa blast				Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
3	Optimalisasi Layanan Di luar Kantor (LDK) Pojok Pajak di Pusat Perbelanjaan serta bekerja sama dengan Universitas dan Instansi Pemerintah				Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
dst...						
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi / 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						
1	Memperbanyak bahan baku yang berasal dari analisis mandiri yang didukung oleh pemahaman proses bisnis dan analisis laporan keuangan	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI		Januari - Desember 2024	Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
2	Mirroring hasil pemeriksaan yang dibayar oleh WP dan keberatan/banding yang dimenangkan oleh DJP.				Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
3	Mengelola tindak lanjut DPP dengan memperhatikan timeline penyelesaian dan membuat skala prioritas penyelesaian (nilai potensi, ability to pay, peta risiko, dan kemudahan komunikasi dengan WP);				Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
4	SP2DK dari DPP Semester I Tahun 2024 agar sudah diterbitkan seluruhnya paling lambat pada akhir bulan April 2024				Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
5	LHP2DK dari DPP Semester I Tahun 2024 agar sudah diterbitkan seluruhnya paling lambat pada akhir bulan Juni 2024				Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
dst...						
Edukasi dan pelayanan yang efektif / 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
1		Seksi Pelayanan				
2						
3						
dst...						
Edukasi dan pelayanan yang efektif / 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan						
1		Seksi Pelayanan				

2						
3						
dst...						
Edukasi dan pelayanan yang efektif / 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa						
1		Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI				
2						
3						
dst...						
Pengujian kepatuhan material yang efektif / 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan						
1		Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI				
2						
3						
dst...						
Pengujian kepatuhan material yang efektif / 06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan						
1	Menindaklanjuti data matching sebelum tahun berjalan yang ada di Approweb untuk dilakukan adjusment DPP pada triwulan berikutnya	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	LHPt Approweb	Januari - Desember 2024	Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
2	Melakukan penelitian terhadap daftar nominatif data STP sebelum tahun berjalan untuk di terbitkan STP sesuai dengan ketentuan yang berlaku		STP		Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
3						
dst...						
Pengujian kepatuhan material yang efektif / 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu						
1	Menyiapkan bahan baku PKM lebih optimal	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Seksi Penjamin Kualitas Data		Januari - Desember 2024	Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
2						
3						
dst...						
Penegakan hukum yang efektif / 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian						
1	Penguatan peran Supervisor/FPP lainnya sebagai pengendali dan pengawas atas pelaksanaan pemeriksaan dalam membentuk KKA/LHPt	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Januari - Desember 2024	Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
2	Optimalisasi PER-5/PJ/2023 tentang percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak			Januari - Desember 2024	Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
3	Menerapkan kebijakan Fokus Audit Pemeriksaan			Januari - Desember 2024	Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
4	Bedah WP dari DSPC dan pengawasan piutang akan daluarsa dengan pemanfaatan basis data internal dan histori treatment termasuk Pembenahan administrasi piutang pajak yang sudah memasuki masa daluarsa untuk dilakukan penelitian administrasi dan penelitian setempat			Januari - Desember 2024	Proses	Dioptimalisasi sampai dengan TW IV Tahun 2024
dst...						
Penegakan hukum yang efektif / 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan						
1	Pemilihan sasaran WP dengan abilty to pay yang tinggi disertai dengan kegiatan yang mendukung pencairan piutang pajak (WA blast, blokir serentak, asset tracing, tax gathering penunggak pajak, dll);	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		Januari - Desember 2024	Selesai	
2	Optimalisasi kegiatan bedah WP terhadap WP DSPC/ WP penunggak pajak 100 besar serta pemanfaatan aplikasi pendukung penagihan “Jakan Pencar”			Januari - Desember 2024	Selesai	
3	Peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek, IHT, Forum Pemeriksaan dan Penagihan.			Januari - Desember 2024	Selesai	
4	Pengawasan dan upaya optimalisasi Tindakan penagihan terhadap piutang yang mendekati daluarsa			Januari - Desember 2024	Selesai	
dst...						
Penegakan hukum yang efektif / 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan						
1	Analisis wajib pajak atas tindak pidana dan profiling Wajib Pajak lebih mendalam	Seksi Pengawasan dan Seksi P3		Januari - Desember 2024	Selesai	
2						
3						
dst...						

Data dan informasi yang berkualitas / 8a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan						
1	Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas KPDL secara berkala dengan mempertimbangkan kinerja terkait KPDL di KPP	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI dan Seksi Penjamian Kualitas Data	KPDL Alket	Januari - Desember 2024	Selesai	
2	Melakukan update data master file Wajib Pajak (KLU, status keaktifan usaha, lokasi usaha, dll) berdasarkan kondisi riil di lapangan		LHPt	Januari - Desember 2024	Selesai	
3	Melakukan percepatan perekaman atas data yang telah diperoleh dengan sebelumnya memastikan kebenaran data yang akan direkam pada aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11		KPDL Mobile	Januari - Desember 2024	Selesai	
dst...						
Data dan informasi yang berkualitas / 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)						
1	Analisis Data	Seksi Penjaminan Kualitas Data		Januari - Desember 2024	Selesai	
2	Monitoring tindak lanjut analisis, pendistribusian dan pemanfaatan data eksternal.			Januari - Desember 2024	Selesai	
3						
dst...						
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif / 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM						
1	Pelaksanaan kegiatan Assessment Center bagi Pejabat Eselon III dan IV, Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP, serta Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	ND, Daftar Hadir, Lap	Januari - Desember 2024	Selesai	
2	Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ICV 2024.		ND, Daftar Hadir, Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Januari - Desember 2024	Selesai	
3						
dst...						
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif / 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit						
1	Melaksanakan IHT dan juga Rapat Pembinaan Terhadap pegawai untuk terus meningkatkan pengetahuan, pelayanan dan juga integritas	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	ND, Daftar hadir, Lap	Januari - Desember 2024	Selesai	
2	Pengawasan melekat dan juga pendampingan dari atasan harus ditingkatkan		ND, ST, Daftar Hadir,	Januari - Desember 2024	Selesai	
3	Kegiatan Pemantauan Kode Etik dan Perilaku oleh UKI tetap dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) dari KPDJP		Laporan	Januari - Desember 2024	Selesai	
dst...						
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif / 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko						
1	Memaksimalkan pelaksanaan rencana mitigasi	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Kelengkapan Dokumen DKO dan MR	Januari - Desember 2024		
2						
3						
dst...						
Pengelolaan keuangan yang akuntabel / 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran						
1	Bekerja sama dan saling mendukung dalam pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan dan peraturan	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Aplikasi Om Span	Januari - Desember 2024		
2						
3						
dst...						
Pengelolaan keuangan yang akuntabel / 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran						
1	Bekerja sama dan saling mendukung dalam pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan dan peraturan	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Aplikasi Om Span	Januari - Desember 2024		
2						
3						
dst...						

PIAGAM PENGHARGAAN

HAKORDIA 2020
Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

KPP PRATAMA SLEMAN

atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 21 Desember 2020

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor KEP-177/WPJ.23/2024

diberikan kepada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

sebagai

Peringkat III Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

Jadilah Unit Kerja Dengan Kinerja Terbaik dan Senantiasa Memberikan Pelayanan Sempurna

Kepala Kantor Wilayah,

Ditandatangani secara elektronik

Erna Sulistyowati

www.pajak.go.id

Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Depok, Sleman 55282
Telepon (0274) 4333940, Faksimili (0274) 4333957; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id;informasi@pajak.go.id